BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu pemahaman tentang pembiayaan pembangunan. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Indonesia selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mencapai pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk di dalamnya adalah bidang perpajakan.

Di negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23A Amandemen Undang-undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung.

Menurut **Mohammad Zain**, (*“Manajemen Perpajakan”*, 2003:15) jenis-jenis dari pajak diantaranya, yaitu:

1. Pajak Negara

- Pajak Penghasilan
- Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)
- Pajak Bumi dan Bangunan
- Bea Materai
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Penerimaan Negara yang berasal dari Migas (Pajak dan Royalti)

2. Pajak Daerah

- a. Daerah Tingkat I
 - Pajak Kendaraan Bermotor
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- b. Daerah Tingkat II
 - Pajak Hotel dan Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C”
 - Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- c. Retribusi Daerah
 - Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Perizinan Tertentu

3. Bea dan Cukai

- a. Bea

- Bea Masuk
 - Bea Keluar
 - Bea Balik Nama
- b. Cukai
- Cukai Tembakau
 - Cukai Rokok
 - Cukai Gula
 - Cukai Alkohol
 - Cukai Minuman Keras

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Dalam Negeri. Melalui analisis penyeimbangan, penerimaan, dan pengeluaran negara dapat direncanakan jumlah pajak yang akan dibebankan pada masyarakat sebagai Wajib Pajak. Mekanisme perpajakan adalah salah satu cara pemerintah untuk memobilisasi sumber daya guna menjamin berlangsungnya pemerintahan dan program-program pembangunan yang dijelankannya. Penerimaan pajak yang optimal menjadi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang adil dan merata. Keberhasilan pembangunan dalam hal ini sangat ditunjang dengan besarnya dana yang dapat dikumpulkan melalui PPh, yang tergantung pada efektif atau tidaknya pelaksanaan pemungutannya itu sendiri. Salah satu cara untuk mengefektifkan pelaksanaan pemungutan PPh melalui struktur pengendalian internal.

Struktur pengendalian internal terdiri dari lingkungan, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan organisasi tercapai. Pengendalian dilakukan untuk menjamin aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan organisasi. Dari uraian diatas, penulis akan menetapkan acuan hanya pada prosedur pengendalian

saja. Untuk itu agar pelaksanaan pengendalian dapat berjalan dengan baik, maka tujuan dari pengendalian internal harus dijalankan untuk melindungi aktiva atau asset negara yang salah satunya diperoleh dari penerimaan PPh, menjamin keakuratan dan keandalan data dari PPh, meningkatkan efisiensi seluruh operasi untuk meningkatkan pendapatan negara.

Keberadaan lembaga yang memfasilitasi Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak menjadi penting untuk memudahkan pelaksanaan peningkatan penerimaan negara. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi sarana yang harus dijalankan dan diawasi dengan baik. Struktur dan proses kerja yang dijalankan oleh KPP harus dapat menunjang tujuan akhir yang diharapkan oleh negara, yaitu memperoleh penerimaan seoptimal mungkin. Disamping itu KPP pun harus dapat melayani Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat menikmati hak-haknya. Kantor Pelayanan Pajak harus dapat menjembatani antara pemenuhan kewajiban-kewajiban Wajib Pajak terhadap negara dan pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dalam pelaksanaannya perlu ditekankan adanya transparansi dan kepatuhan hukum bersama sehingga penerimaan pajak menjadi optimal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak dengan judul **“Peranan Struktur Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan”** (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara).

1.2 Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam Kantor Pelayanan Pajak terdapat Struktur Pengendalian Internal dan dijalankan dengan baik?
2. Sejauh mana peranan Struktur Pengendalian Internal dalam rangka penerimaan terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi dan tujuannya adalah untuk memberikan jawaban dari identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah dalam Kantor Pelayanan Pajak terdapat struktur pengendalian internal dan dijalankan dengan baik..
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan struktur pengendalian internal dalam rangka penerimaan terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang berharga untuk meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana Strata 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

2. Kantor Pelayanan pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pengendalian internal dan untuk meningkatkan kinerja yang seoptimal mungkin demi menunjang peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

3. Pihak Lain yang Membutuhkan

Memberikan gambaran mengenai pengendalian internal yang ada di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga diharapkan dapat menambah serta lebih memperjelas lagi tentang aktivitas Kantor Pelayanan Pajak khususnya aktiva penerimaan Pajak Penghasilan, dengan demikian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan demi menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sesuai dengan arah dan Tujuan Pembangunan Nasional serta Kebijakan Pemerintah dalam PJP Tahap II yang antara lain berbunyi “Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih”.

Menurut **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas**, dalam buku “*Perpajakan Indonesia*”, (2003:24) ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak adalah:

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dengan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment system*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Sistem ini bertujuan untuk melatih Wajib Pajak untuk jujur dan memiliki sikap kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak.

Dengan karakteristik sistem pemungutan pajak tersebut, maka Kantor Pelayanan Pajak sebagai wadah pemenuhan kewajiban perpajakan, menjadi penting kepatuhan hukum dan transparansinya. Kantor Pelayanan Pajak harus

dapat melengkapi dirinya dengan melaksanakan pengendalian internal yang baik untuk mengawasi dan melindungi penerimaan pajak. Hal ini untuk menunjang penerimaan negara yang salah satu sumber utamanya yaitu pajak.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik organisasi/perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut **Nugroho Widjajanto** (*"Sistem Informasi Akuntansi"* 2001:18) pengertian pengendalian intern (*internal control*) yaitu :

“Suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang ditetapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk:

- Mengamankan aktiva perusahaan,
- Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi,
- Meningkatkan efisiensi, dan
- Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.

Pengendalian intern bertujuan untuk menjaga integritas informasi akuntansi, melindungi aktiva perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan, dan pencurian yang dilakukan oleh pihak di dalam maupun di luar organisasi atau perusahaan. Selain itu, pengendalian intern juga harus dapat memudahkan pelacakan kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Oleh karena itu, untuk melancarkan penerimaan pajak dibutuhkan adanya proses pengendalian yang dapat memberikan kepastian bahwa pajak telah dipungut dan dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan dan penyelewengan yang mungkin terjadi.

Dengan pemikiran tersebut, maka pengendalian internal dalam Kantor Pelayanan Pajak harus diperhatikan sejauh mana hubungan antara pengendalian intern dengan efektifitas penerimaan pajak dalam Kantor Pelayanan Pajak, bagaimana pengendalian internal yang terdapat dalam KPP tersebut, serta performa pelayanan pajak dalam KPP tersebut. Dengan adanya pengendalian internal diharapkan penerimaan yang diperoleh sesuai dengan yang dianggarkan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut “Terdapat Hubungan yang Signifikan antara Struktur Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak PenghasilanWajib Pajak Badan”.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam melakukan suatu penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban

dari bahan penelitian dalam lingkungan kerja. Dalam penyusunan proposal ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat digambarkan dengan jelas mengenai objek yang diteliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Adapun tehnik yang digunakan dalam memperoleh data yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data primer secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang sedang diteliti dengan cara melaksanakan prosedur:

- a. Observasi

Yaitu pengumpulan data primer secara langsung terhadap aktivitas organisasi yang sedang diteliti dan hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

- b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai organisasi dan masalah-masalah khusus yang sedang diteliti untuk mendapatkan data yang objektif dengan penelitian.

- c. Dokumentasi

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa peraturan-

peraturan, pedoman-pedoman, brosur serta formulir-formulir yang digunakan di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dan membaca literatur-literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, untuk memperoleh bahan-bahan yang akan dijadikan landasan pemikiran teoritis di dalam melihat dan membahas kenyataan yang ditemui dalam penelitian lapangan.

Berdasarkan judul skripsi yang penulis pilih yaitu “Peranan Struktur Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan”, maka terdapat dua variabel yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel lain. Sesuai hipotesis diatas, yang menjadi variabel bebas adalah “**Struktur Pengendalian Internal Yang Memadai**”, karena variabel ini tidak tergantung pada variabel lain dan dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

2. Variabel Tidak Bebas (*Dependent Variable*)

Variabel tidak bebas adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sesuai hipotesis diatas, yang menjadi variabel tidak bebas adalah “**Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan**”, karena Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dapat ditunjang dengan Struktur Pengendalian Internal yang memadai.

1.7 Lokasi Penelitian

Objek yang dijadikan penulis sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan data adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.